

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2015

(Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar

Sarjana Ilmu Politik Program Study Ilmu Politik

pada Fakultas Ushuluddin Filsafat

UIN Alauddin Makassar

Oleh

MUHAMMAD YUNUS
30600112134

ALAUDDIN
MAKASSAR

JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2016

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada seluruh umat manusia. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, sang pemimpin agung yang selamanya menjadi teladan umat manusia, para sahabat, keluarganya serta pengikutnya yang suci sebagai penggendang cahaya Islam hingga akhir zaman.

Berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah kepada seluruh umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk perjuangan selama penulis menuntut ilmu pada Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul ***“Efektivitas Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahunu 2015” (Study kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)***. Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk dapat memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar. Skripsi ini berisi gambaran mengenai bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang telah di laksanakan sebelumnya, serta dampak positif dan negatif dari pemilihan langsung, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk berbagai pihak terutama pemangku jabatan mengenai pemilihan yang telah dilaksanakan.

Mengenai proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing penulis, dan turut mewarnai kehidupan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M. Si. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta jajarannya WR I, WR II dan WR III yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA. Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik serta jajarannya WD I, WD II dan WD III yang telah mengajarkan penulis tentang karakter atau jiwa kepemimpinan dalam hidup.
3. Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Syahrir Karim, Ph.D selaku sekretaris Jurusan Ilmu Politik yang senang tiasa membimbing penulis dalam penyelesaian study.
4. Dr. Abdullah, M.Ag selaku pembimbing I dan Nur Aliyah Zainal, S.IP.,MA selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Para Dosen Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

6. Karyawan dan staf akademik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Pihak dan Staf Badan Statistik Kabupaten Wajo dan pihak Kecamatan Keera atas data-data dan informasi yang telah diberikan.
8. Terkhusus Kedua orang tua saya yaitu H. Mollo dan Hj. Berliang, seorang Ibu yang telah melahirkan saya, yang tidak pernah bosan untuk memberikan kasih sayang, perhatian serta do'a disetiap sholat nya, dan seorang Bapak yang tidak pernah lelah mencari rezeki untuk anak-anak nya, serta mengajar kan menjadi seorang anak yang jauh lebih baik dari sebelumnya, Semoga ALLAH SWT memberikan kesuksesan, limpahan rahmat dan rezeki serta umur yang panjang agar dapat melihat kesuksesan anak-anaknya, dan juga saudara-saudara kandung yang selalu memberikan dorongan dan motivasi.
9. Bapak dan Ibu masyarakat Kecamatan Keera yang telah menjadi informan peneliti atas kesediannya untuk diwawancarai dan informasi yang diberikan sehingga membantu terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-teman Mahasiswa terkhusus Ilmu Politik 56/78 angkatan 2012 sekaligus sudah menjadi saudara bagi penulis.
11. Terima kasih kepada Keluarga besar KRISPALA (Kreasi Sepakat Pecinta Alam) yang selalu memberikan masukan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan segala rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada yang sempurna di

dunia ini. Begitupun dengan penulisan skripsi ini, yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis berharap, mudah-mudahan skripsi ini bermamfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Wassalam.

Samata-Gowa, 10 November 2016

Penulis


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Muhammad Yunus
Nim: 30600112134

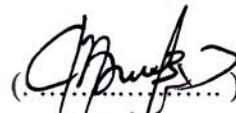
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)", yang disusun oleh Muhammad Yunus, NIM : 30600112134, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam siding munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 28 Desember 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).

Gowa-Samata 28 Desember 2016

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Abdullah, M.Ag.

()

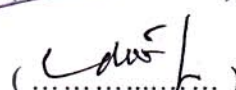
Sekretaris : Syahrir Karim, M.Si., Ph.D.

()

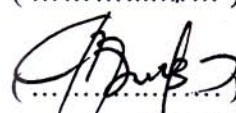
Munaqisy I : Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.SI.

()


Munaqisy II : Dr. Darmawati H, M. HI

()

Pembimbing I : Dr. Abdullah, M.Ag.

()

Pembimbing II : Nur Aliyah Zainal, S.IP.,MA

()

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
UIN Alauddin Makassar,

()

Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
NIP : 19590704 198903 1 003

Daftar Isi

Halaman Judul

Kata Pengantar

Abstrak

Daftar Tabel

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
Bab II Tinjauan Teoretis	15
A. Teori Partisipasi	15
a. Partisipasi Politik	15
b. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik	16
c. Perilaku Politik	18
B. Teori Demokrasi	19
a. Definisi Demokrasi	21
b. Prinsip-Prinsip Demokrasi	23
C. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Desa	24
Bab III Metodologi Penelitian	26
A. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Objek Penelitian	26
3. Lokasi Penelitian	26
4. Teknik Pengumpulan Data	26
a. Metode Wawancara	26

b. Observasi	27
c. Dokumentasi	27
5. Teknik Analisis Data	28
Bab IV Hasil Penelitian	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
a. Geografis	29
b. Pemerintahan Kecamatan Keera	30
c. Pemerintahan Desa	33
B. Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Wajo Tahun 2015	36
C. Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Keera Tahun 2015	38
1. Tahap Persiapan	40
a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa	40
2. Tahap Pencalonan	44
a. Penjaringan dan Seleksi Bakal Calon Kepala Desa	44
b. Penetapan daftar nama calon kepala desa	46
c. Pendataan daftar pemilih di Kecamatan Keera	47
3. Tahap Pemungutan Suara	51
4. Rekapitulasi perhitungan suara dan Penetapan Calon Terpilih...	54
D. Dampak Negatif pada Pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Keera Tahun 2015	56
E. Dampak Negatif pada Pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Keera Tahun 2015	65
Bab V Penutup	67
A. Kesimpulan	67
B. Implikasi	78

Kepustakaan.

ABSTRAK

Nama : Mumahammad Yunus

Nim : 30600112134

Judul : Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2015

(Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)

Pokok masalah penelitian ini membahas tentang pergantian kekuasaan ditingkat lokal melalui bentuk demokrasi di desa dengan fokus pembahasan pada gambaran Pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Keera Tahun 2015. Pokok masalah kemudian diuraikan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Keera Tahun 2015? 2) Bagaimana dampak positif dan negatif pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Keera Tahun 2015?

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan deskriptif berupa kata-kata atau tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan ditingkat lokal. Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti posisi mereka sebagai proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pemungutan suara yang masih beredarnya fenomena uang, pemalsuan berkas calon kandidat, pemalsuan daftar panggilan pemilih, tidak tegasnya Panitia Pengawas dan melanggar Perda Wajo Nomor 5 Tahun 2007 tentang mekanisme Pemilihan Kepala Desa.

Implikasi dalam penelitian ini adalah: 1) Pemilihan Kepala Desa dalam demokrasi lokal agar kedepannya bisa lebih meminilisir yang namanya fenomena uang dalam sebuah demokrasi, lebih mengutamakan kualitas demokrasi, 2) Panitia pemilihan agar lebih mengutamakan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, melakukan pendataan pemilih yang efektif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi secara umum memiliki arti sebagai suatu bentuk politik pemerintahan yang di tentukan oleh rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa saja mereka yang memiliki kekuasaan dan berhak untuk memerintah. Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. Indonesia mengadakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali.

Kualitas demokrasi sebenarnya didasarkan pada banyak hal, khususnya menyangkut tentang transparansi anggaran, partisipasi kelembagaan lokal, dan akomodasi kepentingan masyarakat di dalam pengambilan keputusan atau peraturan di daerah. Pelaksanaan pemilihan bisa saja bervariasi, namun intisarinnya tetap sama untuk semua masyarakat demokratis yakni akses bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapat hak pilih, perlindungan bagi tiap individu terhadap pengaruh suara, dan perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara.¹

Dapat kita awali dengan suatu pemahaman bahwa desa itu adalah suatu hasil perpaduan antara berbagai kelompok kegiatan manusia dengan lingkungannya. Secara lebih formal desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat

¹Rachmad K Dwi Susilo, *Kebijakan Elitisi Politik Indonesia* (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2006) hlm. 180

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana pendapat tokoh sosiologi yaitu **Ferdinand dan Tonnies** mengemukakan desa adalah tempat tinggal suatu masyarakat yang bersifat “*gemeinschaft*” yaitu saling terikat oleh perasaan dan persatuan yang masih erat.

Berdasarkan kamus sosiologi, desa mengandung kompleksitas saling berkaitan satu sama lain diantara unsur-unsurnya, yang sebenarnya desa masih dianggap sebagai standar pemeliharaan kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti gotongroyong, keberibadian dalam berpakaian, adat istiadat dan kehidupan moral dan sebagainya.

Linton dalam Soemardjan dan Soemardi (1964) mengartikan masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan social dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas.²

Mengenai Undang-undang No 19 Tentang Desapraja, yang memayungi desa dengan berbagai bentuk institusi dengan ciri khasnya yang mengakar pada masyarakat. Namun, tahun 1967 pemerintah Orde Baru “ UU No 18 tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah dan mengganti dengan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah. Institusi pemerintahan terkecil (Desapraja) yang ada di daerah harus diganti dan diseragamkan menjadi “Desa”.

²Rasyid Masri, *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan pedesaan* (Makassar: Alauddin University Press, 2014) hlm. 1

Istilah desa seperti yang dikemukakan itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 mengenai desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undan-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengakui adanya Otonomi yang dimiliki oleh Desa dan Kepala Desa dapat diberikan penguasaan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan tertentu, Pemerintah Desa merupakan struktur Pemerintahan paling bawah yang secara langsung berintraksi dengan masyarakat, sehingga kewenangan pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat.⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan di daerah kecil yaitu Desa yang dipilih masyarakat secara langsung oleh penduduk Desa yang memnuhi persyaratan yang berlaku, dengan masa jabatan kepala Desa (lima) 5 tahun dengan ketentuan tata cara pemilihan kepala Desa (pilkades). Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab

³Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan* (Makassar:Alauddin University Press, 2014) hlm. 55

⁴Lihat UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

pada Rakyat Desa dan prosedur pertanggung jawaban yang di sampaikan kepada Bupati melalui camat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemilihan Kepala Desa menurut peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, pada pasal 43 disebutkan bahwa BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis (enam) 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan. BPD memproses Pemilihan Kepala Desa paling lama (empat) 4 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.⁵

Mengenai pasal 47 sampai 52 disebutkan bahwa untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah di tentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan Kepala Desa kepada BPD. Panitia pemilihan melaksanakan penjurian dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan, calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Selain itu, dalam sistem Pemilihan Kepala Desa tidak lepas dari dinamika perkembangan politik lokal. Dalam pemilihan kepala desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi disetiap putaran pemilu di Indonesia. Para calon-calon Kepala Desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan kekuasaan di desa. Kekuasaan selalu ada dalam

⁵UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang Peraturan Daerah.

setiap proses politik yang merupakan tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. Sehingga dalam memenangkan proses pemilihan kepala desa untuk mendapatkan kekuasaan ditingkat desa hingga perlu adanya strategi kampanye maupun strategilainnya yang mengandung unsur kecurangan yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan pemilihan.⁶

Seperti halnya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dilaksanakan di Kabupaten Wajo tepatnya Kecamatan Keera, salah satu Pemilihan Kepala Desa Serentak yang diprogramkan oleh Andi Burhanuddin Unru selaku Bupati Wajo. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Wakil Kepala Desa Serentak yang telah dilaksanakan menyisakan masalah hukum yang tidak dituntaskan, Bupati Wajo dan Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa mengabaikan masalah-masalah seperti pemalsuan berkas, pemalsuan keterangan domisili, pemalsuan ijazah, dan sudah dinyatakan batal namun tiba-tiba bisa diikutsertakan.

Koordinator Bidang Hak Politik dan Lembaga Bantuan Hukum Makassar, AM Fajar Akbar menilai panitia penyelenggara telah melakukan pelanggaran dalam tahap Pemilihan Kepala Desa, seperti melakukan penelitian, klarifikasi, dan verifikasi keabsahan berkas bakal calon kepala desa. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dilaksanakan oleh Bupati Wajo terkesan dipaksakan tanpa adanya kesiapan infrastruktur dan profesionalisme penyelenggara. Bupati Wajo dan Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa telah melanggarketentuan UU No. 16 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Menteri Dalam

⁶Lihat UU pasal 72 Tahun 2005 tentang desa, UU nomor 52 tentang masa jabatan Kepala Desa (enam) 6 tahun dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Negeri No.112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Kabupaten wajo No.1 Tahun 2015 tentang cara pemilihan, dan Peraturan Bupati No.8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan.⁷

Pelanggaran lainnya yang mempengaruhi Efektivitas Pemilihan Kepala Desa Serentak yaitu perilaku calon kandidat yaitu mengenai *money politic* dan *black campaign*, Beberapa pemberi informasi diantaranya Syeck Abdul Khaliq selaku tokoh masyarakat sekaligus anggota DPRD wajo, Muhammad Umar salah satu calon kandidat, H.Mustarin salah satu tokoh masyarakat yang berpengaruh, dan Jurnaidi selaku panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa, mereka mengatakan bahwa aturan yang telah ditetapkan oleh Bupati Wajo dan panitia pelaksanaan pemilihan mengenai *money politic* atau sejenisnya, Jika calon kandidat melakukan sebuah *money politic* maka ketentuan yang harus diterima yaitu diskualifikasi sebagai calon kandidat namun faktanya yang terjadi dilapangan beberapa calon melakukan sogokan atau pemberian amplop namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh panitia penyelenggara dan menurut UU No.72 Tahun 2005 tentang desa yang berbunyi Pemilihan Kepala Desa Langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

Bentuk dari *black campaign* inibiasanya berupa selebaran gelap (*viiegend bladen*) jika dalam wujud tertulis. Dalam lisan, wujudnya bisa desas-desus atau rumor. Namanya saja selebaran gelap, perbuatannya juga tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁸

⁷<http://www.antarasulsel.com/berita/68017/lbh-makassar-kecam-penyelenggara-pilkades-wajo>. 24/07/2016

⁸Rachmad Dwi Susilo, *Kebijakan Elitisi Politik Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 217

Semakin pentingnya kedudukan politik kepala desa, baik dalam artian administrative maupun politik kekuasaan, jabatan desa dapat menjadi ukuran naik turunnya status social. Pejabat desa mempunyai kekuasaan atau sumber-sumber ekonomi desa, mempunyai pengaruh dalam menyalurkan pelayanan social dan pembangunan. Kekuasaan untuk menentukan fasilitas sederhana cukup menjadi alasan adanya persaingan dalam pemilihan aparat desa.⁹

Beberapa kualitas dapat di tunjuk sebagai karakter status baru yaitu kekayaan dan kehormatan sosial. Jika pada tahun sebelumnya orang menjadi lurah atau kepala desa kemudian menjadi kaya, sekarang bisa jadi yang sebaliknya yang terjadi, kekayaan seseorang dapat memberi harapan baik bagi para pemilih dengan beberapa alasan. Kehormatan sosial yang diperoleh seorang calon dari karirnya di desa mempunyai peluang besar daripada kekayaan. Kehormatan dapat datang dari kekayaan, kecakapan, dan sebagainya, seperti kecakapan, kampanye politik merupakan aset pribadi yang penting.¹⁰

Pemilihan Kepala Desa persaingan antara kandidat yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan pemilihan dengan melakukan kecurangan, baik itu dalam bentuk sogokan, maupun pemalsuan data-data.

Berdasarkan dari pelanggaran-pelanggaran pada Pemilihan Kepala Desa tersebut dikeluarkannya peraturan oleh pemerintah pusat melalui Undang-undang

⁹ Fatkhan Mahsuri “ *Pengaruh Money Politik dalam Pilkades*“ Terkait Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspsanteren, *Skripsi*, Program Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kalijaga Yogyakarta

¹⁰ Kuntowijoyo, *Demokrasi dan Budaya Birokrasi* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994) hlm. 156

pasal 46 ayat 2 No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yang berbunyi Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, jujur dan adil.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, yaitu bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Tahun 2015?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Tahun 2015.

Beberapa manfaat dari penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Berguna sebagai bahan pertimbangan dan penelitian baru bagi peneliti lain yang berkaitan dengan Efektivitas Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo 2015.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan dan memberikan penjelasan tentang wacana politik bagaimana sikap dan

¹¹Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010) hlm. 56

pandangan masyarakat setempat menggunakan kebebasan hak memilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat agar dapat memahami pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa selanjutnya secara efektif dan berjalan secara adil dan jujur.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis lainnya terhadap tema skripsi yang mirip, yaitu sebagai berikut :

Fadhil Ilhamsyah, Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Tahun 2014 Skripsi yang berjudul “Efektivitas Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung dalam Mewujudkan Demokrasi di Aceh” peneliti bertujuan untuk Menganalisis Efektivitas Pemilihan Gubernur, dalam penelitiannya masih ditemukan praktek-praktek intimidasi, kekerasan dan *money politik* sehingga dapat merusak perkembangan demokrasi di Aceh peneliti mengemukakan pemilu sudah belum efektif.¹²

Muhammad Indra Lesmana, Jurusan Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2015, Skripsi “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Terkait Penyelenggaraan

¹²**Fadhil Ilhamsyah**, “Efektivitas Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung dalam Mewujudkan Demokrasi di Aceh” Skripsi, Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Aceh 2014.

Pemilihan Umum Serentak Ditinjau Dari Perspektif Demokrasi“ Peneliti terfokus pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilihan serentak ditinjau dari perspektif demokrasi dan menurut penelitian isi dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi antara lain: **Menurut Mahkamah Konstitusi**, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial kearah yang dikehendaki.¹³

Putu Yudistira, Jurusan Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Pasundan Tahun 2016, Skripsi “Implementasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung dan Serentak Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015” Penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia dilaksanakan menurut prinsip demokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945. dalam pasal tersebut diatur bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. pengaturan mekanisme jabatan kepala daerah dalam konstitusi pasca amandemen menunjukan bahwa pengisian kepala daerah dalam lingkup pemerintahan daerah menjadi bagian penting dalam demokratisasi di Indonesia. ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dimana pemilihan kepala daerah dan wakil

¹³**Muhammad Indra Lesmana**, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait penyelenggaraan pemilihan umum serentak ditinjau dari perspektif demokrasi*” Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2015.

kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.¹⁴

Nadia Erisanti, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun 2014, Skripsi "Efisiensi dan Efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah" tujuan dari peneliti adalah Untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektivitas pemilihan umum kepala daerah langsung ditinjau dari Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta mendeskripsikan dan memberikan gambaran mengenai dampak positif dan negatif dari pemilihan umum kepala daerah secara langsung.¹⁵

Saiful Ansori, Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014, Skripsi "Model Pemilu Legislatif dan Eksekutif secara serentak" dengan studi kasus Pilgub dan Pileg secara serentak di Provinsi Lampung. Dalam penelitiannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang independen, memiliki kewenangan untuk mengatur mekanisme jalannya pemilu. Begitu juga dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam menjalankan tugasnya dengan independen. Maka terkait penyelenggaraan Pilkada Lampung yang seharusnya dijadwalkan pada tahun 2013

¹⁴**Putu Yudistira**, "Implementasi Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung dan Serentak menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015" Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016.

¹⁵**Nadia Erisanti**, "Efisiensi dan Efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah" Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014.

dan selambat-lambatnya bulan Oktober 2013 terjadi kendala mengenai waktu pelaksanaan dalam Pilkada Provinsi Lampung. Sebelumnya KPU Lampung menetapkan Keputusan Nomor: 75/Kpts/KPU-Prov-008/2012 tentang penetapan hari dan tanggal pemungutan suara yakni pada hari Rabu, 2 Oktober 2013 untuk putaran pertama dan pada hari Rabu, 4 Desember 2013 untuk putaran kedua. Komisi Pemilihan Umum kemudian menjadwalkan kembali pada tanggal 2 Desember 2013, hal ini pun juga gagal dilaksanakan. Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 55/Kpts/KPU-Prov-008/2013 Komisi Pemilihan Umum Lampung telah menetapkan kembali hari Kamis, 27 Februari 2014 putaran pertama dan pada hari Sabtu, 10 Mei 2014 untuk putaran kedua, namun hal tersebut juga ditunda. Kemudian dalam rapat pleno KPU Provinsi Lampung Nomor: 09/BA/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 menetapkan, bahwa hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2014-2019.¹⁶

E. Tinjauan Teori

1. Teori Partisipasi

Teori partisipasi adalah pelaksanaan suatu kegiatan tidak terlepas dari suatu tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang akan dicapai harus ada dukungan serta keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan merupakan partisipasi seseorang yang patut dihargai, serta diharapkan ada manfaat serta tujuan atas keikutsertaan tersebut. Partisipasi ditandai dengan keterlibatan seseorang dalam suatu kelompok baik moril maupun materi serta adanya rasa tanggungjawab.

¹⁶**Saiful Ansori**, "*Model Pemilu Legislatif dan Eksekutif secara Serentak*" Skripsi, Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014.

Pengertian partisipasi dilihat dari segi *etimologi*, kata partisipasi berasal dari bahasa Belanda “*participare*” dalam Bahasa Inggris kata partisipasi adalah “*participations*” menurut **Moelyanto Tjokrowinoto** partisipasi adalah penyertaan mental dan emosi dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir dan perasaan mereka bagi tercapainya tujuan-tujuan bersama, bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut.

Menurut Kafler yang dikutip oleh **Mulyono** mengenai partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan yang mencurahkan baik fisik maupun mental dan emosional. Partisipasi fisik merupakan partisipasi yang langsung ikut serta dalam kegiatan tersebut, sedangkan partisipasi secara mental dan emosional merupakan partisipasi dengan memberikan saran, pemikiran, gagasan, dan aspek mental lainnya yang menunjang tujuan yang diharapkan. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokratis dimana orang dilibatkan dan diikutsertakan dalam perencanaan serta pelaksanaan serta ikut bertanggung jawab sesuai tingkat kewajiban.¹⁷

a. Partisipasi Politik

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih Pemimpin Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)

¹⁷ Rosmiati Ibrahim, “*Perempuan dan Politik*”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN ALAUDDIN MAKASSAR), 2015. hlm.16

Norman H. Nie dan Sidney mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyaknya langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi Pejabat Negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.¹⁸

Partisipasi politik masyarakat, khususnya partisipasi pada pemilihan kepala daerah dalam ilmu politik terangkum sebagai bagian dari perilaku politik. Partisipasi politik menurut **Huntingto dan Joan Nelson** adalah suatu sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya mempengaruhi Pejabat Pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Rasinski dan Tyler menguraikan bahwa inti dari partisipasi politik adalah tindakan masyarakat yang dapat mempengaruhi keputusan politik. Orang yang paling tahu tentang suatu keinginan ialah masyarakat atau individu itu sendiri. Oleh karena itu, partisipasi politik individu didalam agregasi masyarakat sangat berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut harkat kehidupan mereka sendiri.¹⁹

b. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat diwujudkan kedalam berbagai bentuk atau sikap, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, kampanye pada saat menjelang pemilihan, mencari dukungan untuk seorang kandidat dan lain-lain.

¹⁸ Cholisin& Nasiwan. *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012) hlm. 144

¹⁹ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 188

2. *Lobbying* mencakup upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi elit-elit politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan yang melingkupi pemilihan.
3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi-organisasi massa, baik yang berada dalam posisi partai ataupun tidak. Dengan tujuan utama mendukung salah satu pasangan calon.
4. Mencari koneksi merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap elit-elit politik daerah/pusat dan biasanya memperoleh manfaat bagi hanya satu orang.
5. Tindakan kekerasan: Demonstrasi yang dibarengi dengan tindakan destruktif dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik, karena dengan tindakan kekerasan bisa juga mempengaruhi pengambilan keputusan pejabat terkait (KPUD bahkan Kepala Daerah terpilih).

Menurut **Milbrath dan Goel (1997)** dibagi empat kategori, yakni :

1. Apatis, orang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Speaktator, orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Gladiator, mereka-mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik dan terakhir.
4. Pengkritik, yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional.

Meminjam istilah **Myron Weiner**, sehingga yang terjadi adalah irasional perilaku politik masyarakat. Hal yang lain menyebabkan irasionalnya perilaku

politik masyarakat adalah perilaku elit politik yang tidak demokratis dapat berupa:²⁰

1. Pembelian suara (*money politic*).
2. Paksaan terhadap anggot organisasi massa netral.
3. Keberpihakan rezim pilkada pada salah satu pasangan calon.

c. Perilaku Politik

Secara umum perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik, perilaku politik juga termasuk kegiatan masyarakat dalam proses meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, serta mengembangkan kekuasaan. Pengertian lain perilaku politik adalah semua perilaku manusia baik sebagai individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, konflik, kebaikan bersama, serta kekuasaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik sebagai berikut:

1. Lingkungan sosial politik langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa.
2. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk keperibadian aktor seperti, keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan.

²⁰ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal...* hlm. 192

Lingkungan sosial politik langsung berupa situasi yaitu keadaan melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, dan ancaman dalam segala bentuknya.²¹

Image seorang calon lahir akibat penilaian masyarakat. Penilaian itu dilakukan secara *ex-post* dan bukan *ex-ante*, penilaian *ex-post* berarti masyarakat menilai apa-apa saja yang telah dilakukan seorang calon. Dalam banyak penelitian ditemukan bahwa membangun *image* membutuhkan waktu lama, dan konsistensi yang tinggi supaya bisa terus-menerus berkenaan dihati masyarakat.²²

2. Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat yang juga dikemukakan oleh **Caster I. Bernard**, efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama dan menurut **Cambel J.P**, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah²³ :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program

²¹ Cholisin dan Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Ombak, 2014) hlm. 144

²² Joko J. Prihatmoko Moesafa, *Menang Pemilu di Tengah Oligarki* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 151

²³ Fitra Dewinta Purba, “*Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai*” *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2011

4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Kata efektif secara *etimologi* berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut **Harbani Pasolong**, efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain, Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Kata efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda walaupun dalam berbagi penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Menurut **Ravianto**, pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.²⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah suatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan membawa hasil dari suatu usaha atau tindakan. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung

²⁴ Nuryahman, yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa” Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Esa Unggul Jakarta: 2014

pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan²⁵.

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan ini. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.²⁶

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat **H. Emerson** yang dikutip **Soewarno Handayani** yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran

²⁵ Nadia Erizanti, “Efisiensi dan Efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah,” Skripsi, Universitas Bengkulu, 2004

²⁶ Melati Lie, “Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo” Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar 2015.

dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. ”Dalam kamus besar bahasa Indonesia efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruh), dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang undang-undang/peraturan). Lebih mendalam lagi dilanjutkan Menurut **Richard M. Steers**, efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Gibson et. Al dikutip dari PKP2A III LAN mengatakan pengertian efektivitas adalah; “penilaian yang dibuat sesuai prestasi individu, kelompok dan organisasi”. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka akan lebih efektif dalam menilai mereka.

Dari pengertian tersebut diatas dari sudut pandang bidang perilaku keorganisasian maka dapat di identifikasikan tiga tingkatan analisis yaitu: ²⁷

- a. Individu: efektivitas individu, menekankan pada pelaksanaan tugas pekerja atau anggota organisasi. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan adalah bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi tersebut.
- b. Efektivitas kelompok: efektivitas kelompok, yang merupakan jumlah kontribusi dari setiap anggota.

²⁷ Huvat, “Efektivitas Kerja Fasilitator Kecamatan Bagian Program PNPM” Jurnal, pemerintahan Integratif, 2015. 20/08/2016 volume 3 Nomor 1 2015: 76-87

- c. Efektivitas organisasi: merupakan fungsi efektivitas individu dan kelompok

Kata efektif berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. **Siagian** memberikan pengertian tentang efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu: “penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya , berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.” **T. Hani Handoko** efektivitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁸

Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Prinsip efektivitas dalam sektor kegiatan-kegiatan publik memiliki makna ganda, yakni efektivitas dalam pelaksanaan proses-proses pekerjaan, baik oleh pejabat publik maupun partisipasi masyarakat. Kedua, efektivitas dalam konteks hasil, mampu memberikan kesejahteraan pada sebesar-besarnya kelompok dan lapisan sosial.²⁹

²⁸ Andi Abdillah Hermansyah, “Efektivitas Pemungutan Pajak Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Makassar,” *Skripsi*, Fakultas Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, 2015.

²⁹ Saiful Ansori, “Bentuk Pemilu Legislatif dan Eksekutif Secara Serentak” *Skripsi*, Universitas Sunan Kalijaga, 2014

3. Teori Demokrasi

Esensi Demokrasi adalah partisipasi publik dalam menentukan pejabat-pejabat politik dan dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam pandangan **Resseau**, demokrasi tanpa partisipasi langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri.³⁰

Affan Gaffar mengemukakan bahwa dalam politik dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi yaitu pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Untuk pemahaman yang kedua dikenal dengan istilah *procedural democracy*. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang hendak dilakukan/ diselenggarakan oleh sebuah negara seperti dalam ungkapan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ungkapan normatif tersebut biasanya termuat dalam konstitusi masing-masing negara seperti dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pandangan demokrasi dalam contoh empirik adalah musyawarah mufakat. Sedangkan **Robert A. Dahl** mengemukakan bahwa sistem yang demokratis ditentukan dengan syarat sebagai berikut:³¹

- a. Akuntabilitas, dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.

³⁰ Dede mariana & Carolina Paskarina, *Demokrasi & Politik Desentralisasi* (Bandung: Graha Ilmu) hlm. 32

³¹ Nadia Erizanti, "*Efesiensi dan Efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah*," Skripsi, Universitas Bengkulu, 2004

- b. Rotasi kekuasaan dalam demokrasi, pemegang kekuasaan tidak menjalankan kekuasaannya secara terus menerus dalam waktu yang lama, terdapat suatu sistem pemilihan umum yang menyebabkan adanya rotasi kekuasaan di negara tersebut.
- c. Rekrutment politik yang terbuka dalam demokrasi, terdapat suatu rekrutmen politik yang transparan bagi masyarakat. Untuk tercapainya syarat ini maka suatu sistem pemilihan umum secara langsung menjadi syarat untuk terpenuhinya suatu rekrutmen politik yang terbuka.
- d. Pemilihan umum yang jujur, dalam demokrasi, pemilihan umum yang dilaksanakan adalah pemilihan umum yang jujur, tanpa rekayasa dan hasil dari pemilihan umum benar-benar merupakan hasil yang berasal dari suara rakyat.
- e. Menghormati hak-hak dasar, dalam demokrasi, seluruh penyelenggara negara dan pemerintahan memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara antara lain hak memperoleh penghidupan layak, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pendidikan dan hak-hak dasar lainnya.
- f. Persamaan dalam hak politik, dalam demokrasi, harus terdapat persamaan dalam penyaluran hak-hak politik dari warga negara.

a. Defenisi Demokrasi

Demokrasi berasal dari perkataan Grika, *demos* berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan/kedaulatan. Demokrasi menurut akar kata itu berarti pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat banyak³².

Menurut mantan Presiden Tanzania, **Julius Nyeres**, defenisi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), oeh rakyat (*government by people*), dan untuk rakyat (*government for people*). Dan demokrasi dalam sisi lain yang dikemukakan oleh Abdulrahman Wahid (Gusdur) bahwa demokrasi sejati adalah demokrasi yang melindungi dan membela hak-hak minoritas, pemerintahan menjadi tidak demokratis apabila memenuhi aspirasi mayoritas, memihak mayoritas adalah sektarianisme dan membela minoritas adalah demokrasi.³³

Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.³⁴

³² J.M Papasi, *Ilmu Politik Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm 57

³³ Irfan Idris & Hamdan Jurhanis, *Imlu Politik* (Makassar: Alauddin Press, 20109) hlm. 144

³⁴ Ubaedillah & Abdul Rozak, *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm. 39

Pernyataan **Kellong** bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana penguasa dibentuk oleh warga masyarakat, kepada merekalah penguasa akan mengabdikan.³⁵

Membahas demokrasi, mau tidak mau akan kembali pada awal demokrasi, yang sering dikenal dengan demokrasi athena, demokrasi yang dilaksanakan di Kota Athena masa lampau. Menurut Arendt, demokrasi Athena merupakan sejarah dimulainya demokrasi, suatu pemerintahan yang mengelola kedaulatan rakyat atau negara. Dalam demokrasi mencakup kekuasaan, penguasa, dan yang dikuasai, serta berbagai peraturan berkaitan bagaimana kekuasaan dikelola yang lebih bersifat individual.³⁶

Mekanisme pemilihan pilkada langsung hanya bagian kecil dari peningkatan kualitas demokrasi ditingkat lokal. Demokrasi ditingkat lokal sangat membutuhkan berbagai persyaratan, khususnya bagi masyarakat para pemilih itu sendiri sebagai pemilik tertinggi kedaulatan di Negeri ini. Bahkan sangat disayangkan karena tingkat pendidikan yang rendah, belum terbiasa untuk aktif berpartisipasi, cenderung emosional, dalam proses politik mereka juga sangat mudah dimanipulasi, baik secara simbol maupun secara material yang kemudian sangat menjauhkan mereka dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri.³⁷

³⁵ Zamroni, *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013) hlm. 56

³⁶ Zamroni, *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultur.....*hlm. 45

³⁷ Rachmad Dwi Susilo, *Kebijakan Elitisi Politik Indonesia* (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2006) hlm. 180

a. Prinsip-prinsip demokrasi.

Suasana kehidupan yang demokrasi merupakan dambaan bagi umat manusia termasuk Warga Negara Indonesia karena pada prinsip nya menurut Inu Kencana yaitu:

1. Adanya pembagian kekuasaan,
2. Adanya pemilihan umum yang bebas,
3. Adanya manajemen terbuka,
4. Adanya kebebasan individu,
5. Adanya peralihan yang bebas,
6. Adanya pengakuan hak minoritas,
7. Adanya pemerintahan yang berdasarkan atas hukum,
8. Adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggung jawab.

Prinsip pembangunan demokrasi politik desa adalah untuk mewujudkan sebuah pemerintahan desa yang demokratis dilakukan dengan menjalankan 3 prinsip demokratisasi desa yakni Pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang dalam menentukan siapa yang berhak menduduki kursi di lembaga politik negara, legislatif dan eksekutif: ³⁸

1. Partisipasi yakni dalam pengambilan suatu keputusan yang di ambil dalam pemerintahan harus dengan persetujuan rakyat desa.

³⁸ Hery Kurniawan, "Politik Lokal Di Tingkat Desa" (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), Skripsi, Jurusan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara Medan, 2009,

2. Pertanggungjawaban yakni dengan semua lembaga yang ada dalam pemerintahan desa harus bertanggungjawab kepada masyarakat desa.
3. Keadilan, yakni pemerintahan harus dapat berdiri diatas semua golongan tanpa adanya diskriminasi dalam menjalankan pemerintahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dilakukan di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Tahun 2015 lalu.

Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia dalam wilayahnya. Dan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati³⁹.

Sedangkan menurut **Taylor dan Bogdan**, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata tertulis maupun lisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.⁴⁰

³⁹ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1989) hlm. 4

⁴⁰ Bagong Suyanto Sutina, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2005) hlm. 166

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara metodologi politik, yakni mengumpulkan informasi dengan melakukan observasi serta wawancara terhadap informan berdasarkan dari fenomena-fenomena yang diamati atau tingkah laku manusia meliputi dengan apa yang dikatakan dan diperbuatnya.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dimaksud disini adalah menganalisis suatu individu, keadaan atau kelompok tertentu yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak yang dilakukan di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Tahun 2015, baik dari segi tingkahlaku maupun secara lisan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah peneliti sendiri yaitu Kecamatan Keera Kabupaten Wajo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

a. Metode Wawancara

Peneliti melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai “pemimpin” dalam proses wawancara tersebut. Dan informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara.

b. Observasi (Pengamatan Lapangan)

Observasi atau pengamatan yang dilakukan adalah mengamati kegiatan keseharian dengan manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan lainnya. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Yang dimaksud dengan diatas adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁴¹

c. Dokumentasi

Penggunaan foto untuk melengkapi sumber data jelas besar sekali manfaatnya. Pada umumnya memberikan gambaran tentang foto sebagai data atau sebagai pendorong kearah menghasilkan data, perlu dikemukakan satu hal penting yaitu apabila sumber datanya berasal dari gambar akan baik sekali bila data itu dimasukkan kedalam catatan lapangan, barulah dianalisis.⁴²

5. Teknik Analisis Data

Analisis data (Bogdan & Biklen) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan.⁴³

⁴¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Media Group, 2007) hlm. 111

⁴² Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1989) hlm. 157

⁴³ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.....hlm 249

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo dengan Ibu Kotanya Sengkang, terletak dibagian tengah propinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari ibukota provinsi, memanjang pada arah laut Tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan posisi geografis antara 3° 39' - 4° 16' LS dan 119° 53'-120° 27' BT

Batas wilayah Kabupaten Wajo sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap

Sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Soppeng,

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Sidrap

Luas wilayahnya adalah 2.506,19 Km² atau 4,01% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan dengan rincian Penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 86.297 Ha (34,43%) dan lahan kering 164.322 Ha (65,57%). Pada tahun 2007 Kabupaten Wajo telah terbagi menjadi 14 wilayah Kecamatan, selanjutnya dari keempat-belas wilayah Kecamatan di dalamnya terbentuk wilayah-wilayah yang lebih kecil, yaitu secara keseluruhan terbentuk 48 wilayah yang berstatus Kelurahan dan 128 wilayah yang berstatus Desa.

Luas Daerah Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan

Tabel 1 : Luas menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km2)	% Terhadap Luas Kabupaten
1	Sabbangparu	137.75	5.3
2	Tempe	38.27	1.53
3	Pammana	162.1	66.47
4	Bola	220.13	8.78
5	Takkalalla	179.76	7.17
6	Sajoanging	167.01	6.66
7	Penrang	154.9	6.18
8	Majauleng	225.92	9.01
9	Tanasitolo	154.6	6.17
10	Belawa	172.3	6.88
11	Maniangpajo	175.96	7.02
12	Gilireng	147	5.87
13	Keera	368.36	14.7
14	Pitumpanua	207.13	8.26
Kabupaten Wajo		2.506.19	100

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Wajo

Tabel 2: Menurut pembagian wilayah setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Sabbangparu	12	3
2	Tempe	-	16
3	Pammana	13	2
4	Bola	10	1
5	Takkalalla	11	2
6	Sajoanging	6	3
7	Penrang	9	1
8	Majauleng	14	4
9	Tanasitolo	15	4
10	Belawa	6	3
11	Maniangpajo	5	3
12	Gilireng	8	1
13	Keera	9	1
14	Pitumpanua	10	4
	JUMLAH	128	48

Masing-masing wilayah kecamatan tersebut mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda meskipun perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan sumber-sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan di wilayahnya. Topografi Dan Kelerengan Topografi di Kabupaten Wajo mempunyai kemiringan lahan cukup bervariasi mulai dari datar, bergelombang hingga berbukit. Sebagian besar wilayahnya tergolong datar dengan kemiringan lahan/lereng 0 – 2 % luasnya mencapai 212,341 Ha atau sekitar 84 %, sedangkan lahan datar hingga bergelombang dengan kemiringan / lereng 3 – 15 % luas 21,116 Ha (8,43%), lahan yang berbukit dengan kemiringan / lereng diatas 16 – 40 % luas 13,752 Ha (5,50 %) dan kemiringan lahan diatas 40 % (bergunung) hanya memiliki luas 3,316 Ha (1,32%).

Secara morfologi, Kabupaten Wajo mempunyai ketinggian lahan di atas permukaan laut (dpl) dengan perincian sebagai berikut :

1. 0 – 7 meter, luas 57,263 Ha atau sekitar 22,85 %
2. 8 – 25 meter, luas 94,539 Ha atau sekitar 37,72 %
3. 26 – 100 meter, luas 87,419 Ha atau sekitar 34,90 %
4. 101 – 500 meter, luas 11,231 Ha atau sekitar 4,50 % dan ketinggian di atas 500 meter luasnya hanya 167 Ha atau sekitar 0,66 %.

Kondisi alam tata guna lahan di Kabupaten Wajo secara umum terdiri atas sawah, perkebunan, perumahan, tambak, fasilitas sosial, fasilitas ekonomi dan

lahan kosong. Pergeseran pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Wajo secara umum belum mengalami perubahan yang cukup drastis hanya beberapa bagian kawasan strategis di wilayah perkotaan cepat tumbuh akibat terjadinya peningkatan pembangunan jumlah unit perumahan dan pengadaan sarana prasarana umum. Daerah Pesisir Pantai Kabupaten Wajo terdapat 6 (enam) kecamatan yang merupakan wilayah pesisir pantai yaitu⁴⁴ :

1. Kecamatan Pitumpanua
2. Kecamatan Keera
3. Kecamatan Takkalalla
4. Kecamatan Sajoanging
5. Kecamatan Penrang
6. Kecamatan Bola

Jumlah desa yang masuk dalam 6 kecamatan tersebut adalah 25 Desa yang langsung berada di pantai pesisir dan perbatasan dengan laut, dan 42 Desa yang berada di daratan.

⁴⁴ Data Statistik Kabupaten Wajo. 25/07/2016

B. Kecamatan Keera Kabupaten Wajo.

a. Geografis

Luas Wilayah menurut Desa dan Kelurahan di Kecamatan Keera

Tabel 3: Luas wilayah setiap desa/kelurahan

Desa/Kelurahan	Luas (Km)	Persentase
Lalliseng	47,17	12,26
Pattirolokka	45,16	12,26
Inrello	62,50	16,9
Keera	23,15	6,16
Ballere	31,04	8,42
Ciromanie	30,23	8,21
Labawang	12,05	3,27
Pojepe	41,66	13,31
Awota	37,15	10,93
Kecamatan Keera	368,36	100.00

C. Pemerintahan Kecamatan Keera

Kecamatan Keera adalah salah satu wilayah dari Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan, yang terletak ± 250 km dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, dan 60 km dari Kota Sengkang. Kecamatan Keera awalnya merupakan Kecamatan Perwakilan hasil pemekaran Kecamatan Pitumpanua pada tahun 1995, dan didefinisikan pada Tahun 1999.

Kecamatan Keera mempunyai 9 desa dan 1 kelurahan, antara lain :⁴⁶

1. Kelurahan Ballere
2. Desa Pattirolokka
3. Desa Lalliseng
4. Desa Inrello
5. Desa Keera
6. Desa Ciromanie
7. Desa Labawang
8. Desa Paojepe
9. Desa Awota
10. Desa Awo

⁴⁶ Draf dokumen Kecamatan Keera. 24/07/2016

a. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Desa/Kelurahan Kecamatan Keera 2010-2015⁴⁷

Tabel 4: Jumlah penduduk menurut Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
	2010-2015	2010-2015
Lalliseng	3164-3448	8,24
Pattirolokka	1623-2014	19,41
Inrello	2897-3007	3,66
Keera	1377-1496	7,95
Ballere	2799-2961	5,47
Ciromanie	1153-1214	5,02
Labawang	885-1019	13,15
Pojepe	2179-2281	4,47
Awota	2735-305	10,18
Awo	2922-3187	8,32
Kecamatan Keera	21734-23672	8,92

⁴⁷ Data Statistik Kabupaten Wajo 2015. 25/07/2016.

b. Kondisi Pemerintahan Desa/Kelurahan Kecamatan Keera.

Tabel 5: Jumlah penduduk sesuai dengan potensi Kecamatan Keera

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km)	Dusun	RT	RW	KK	Penduduk	
							Pria	Wanita
1	Lalliseng	45,17	3	3	11	784	1586	1705
2	Pattirolokka	45,16	2	6	12	568	1438	955
3	Inrello	62,50	2	6	12	812	1438	1521
4	Keera	23,15	4	6	12	512	700	728
5	Ballere	31,04	2	6	18	266	1380	1487
6	Ciromanie	30,23	3	6	12	450	570	606
7	Labawang	12,05	2	6	18	266	462	512
8	Pojepe	41,66	4	17	28	488	1109	1093
9	Awota	37,15	4	5	15	751	1451	1451
10	Awo	40,25	5	4	12	846	1581	1420

D. Bentuk Pemerintahan Desa

a. Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai pimpinan dan penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertindak sebagai lembaga Eksekutif dalam pemerintahan desa untuk dapat menjalankan roda pemerintahan desa. Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif yang berfungsi sebagai pengawas jalannya pemerintah desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa (Pilkades) yang bersifat langsung bila masa pemerintahan kepala desa telah berakhir. Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya. Kepala desa bukan sebagai pegawai pemerintahan dan harus melepaskan jabatannya sebelumnya untuk menjaga netralitas dalam mewujudkan otonomi desa.

Tugas dan kewajiban kepala desa meliputi ⁴⁷:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Membina kehidupan masyarakat desa.
3. membina perekonomian desa.

⁴⁷Hery Kurniawan, “Politik Lokal Di Tingkat Desa” (*Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa*), Skripsi, Jurusan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara Medan, 2009

4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
6. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasanya.
7. Menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD dan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah.
8. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

b. Perangkat desa.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang berasal dari pegawai pemerintahan kecamatan. Perangkat desa yang terbentuk terdiri dari :

- a. Unsur pelayanan yaitu Sekretariat Desa yang di pimpin sekretaris desa. sekretaris desa mempunyai tugas untuk membantu tugas kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. fungsi dari sekretaris desa meliputi⁴⁸ :
 1. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa.
 2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur sekretariat desa.
 3. Merumuskan program kegiatan kepala desa.
 4. Menyusun Rencana dan Penerimaan dan Belanja Desa.

⁴⁸ Draf dokumen PMD Kabupaten Wajo.

5. Melaksanakan Administrasi kepegawaian Aparat Desa
6. Menyiapkan Produk hukum Desa.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

c. Kepala Dusun.

Kepala dusun merupakan pembantu kepala desa. Kepala Desa mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa di wilayah dusun. Kepala dusun sebagai perpanjangan tangan kepala desa dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat di tiap dusun. Dalam menjalankan tugasnya kepala dusun bertanggungjawab kepada kepala desa. Kepala dusun dipilih masyarakat di dusun tersebut melalui musyawarah di tingkat dusun.

Fungsi dari kepala dusun meliputi⁴⁹ :

1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di wilayah kerjanya.
2. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta pembinaan kehidupan dan kerukunan masyarakat di wilayah kerjanya.
3. Mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah kerjanya.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

⁴⁹ Draf dokumen PMD Kabupaten Wajo.

BAB III

HASIL PENELITIAN

Penulis akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, melalui wawancara mendalam dengan segenap komponen-komponen yang terkait dari judul penelitian ini. Akhirnya penulis banyak mendapatkan data faktual mengenai Efektivitas Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2015, hal ini akan diuraikan sebagai berikut:

A. *Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Wajo.*

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak yang dilaksanakan pada bulan April Tahun 2015 diikuti oleh 13 Kecamatan di Kabupaten Wajo antara lain jumlah Desa berdasarkan Kecamatan yakni, Gilireng 4 desa, Pitumpanua 10 desa, Pammana 6 desa, Belawa 5 desa, Takkalalla 5 desa, Sabbangparu 9 desa, Penrang 7 desa, Tanasitolo 5 desa, Majauleng 13 desa, Keera 6 desa, Maniangpajo 4 desa dan Bola 5 desa dan sajoangin 9 desa.⁵⁰ Yang pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Wajo.

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk demokrasi pada umumnya, proses dimana masyarakat menentukan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, menyuarakan kepentingan rakyat banyak. Demokrasi dalam sudut pandang islam adalah musyawarah untuk penyelesaian suatu permasalahan yang ada pada wilayah masyarakat. Istilah musyawarah dijelaskan dalam (QS *Asy-Syuura*: 38)

⁵⁰ Edi Prekende, Wajo Sebagai Percontohan Perda Pilkades, *Kabar Wajo*, may 15 2015. <http://www.beritawajo.com/wajo-percontohan-perda-pilkades/5977/> 24/07/2016

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya:⁵¹

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.” (QS Asy Syura : 38)

Ayat diatas menjelaskan bahwa didalam sebuah demokrasi (musyawarah) mengenai permasalahan-permasalahan yang ada kekuasaan berada pada tangan masyarakat atau rakyat banyak. Rakyatlah yang menentukan sebuah pilihan untuk kehidupan mereka kedepannya yang lebih baik.

Penyelenggaraan Pilkades serentak Kabupaten Wajo yang dilaksanakan pada bulan April 2015, menyisakan sejumlah masalah hukum yang tidak dituntaskan. Bupati Wajo dan Penyelenggara Pilkades mengabaikan masalah-masalah seperti pemalsuan berkas calon kepala desa, pemalsuan keterangan domisili, pemalsuan Ijazah, berkas calon serta sudah dinyatakan batal tiba-tiba bisa diikut sertakan. Ironisnya sebelum batas waktu penyelesaian sengketa (30 hari), Bupati Wajo pada tanggal 25 Mei 2015 telah mengeluarkan surat keputusan tentang pengesahan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) berkenaan

⁵¹ Al-quran, Asy Surah Ayat 38, 17/11/2016

calon Kepala Desa terpilih dalam Pilkades serentak Kab Wajo, sementara sengketa yang muncul selama tahapan Pilkades masih berlangsung dan tak kunjung mendapatkan penyelesaian yang berkeadilan. Hal ini menyebabkan penyelesaian sengketa Pilkades tersebut harus bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan menimbulkan dampak buruk dari pelaksanaan pesta demokrasi di desa ke depannya. Pelaksanaan Pilkades serentak Kab Wajo terkesan dipaksakan tanpa kesiapan infrastruktur dan profesionalisme penyelenggara.⁵²

Meskipun Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak masih menyisahkan berbagai masalah, namun Kabupaten Wajo tetap menjadi percontohan bagi daerah lain. Tercatat sudah ada tiga daerah yang belajar perda pilkades di Wajo yakni Kabupaten Pangkep, Luwu Timur, dan Bone. Jumat, 15 Mei 2015. Rombongan DPRD Kabupaten Bone yang melakukan kunjungan di DPRD Wajo guna mempelajari perda Pilkades. Ketua Rombongan Study Banding DPRD Bone, Saifullah Latif mengatakan jika kedatangannya di Bumi Lamaddukkelleng untuk shering pendapat dengan DPRD Wajo terkait pembentukan peraturan daerah tentang pemilihan calon kepala desa. Menurutnya, di kabupaten Bone ada 183 kepala desa yang sudah demisioner dan ke 183 ini akan mengikuti pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bone.⁵³

⁵² Edi Prekende, Wajo Sebagai Percontohan Perda Pilkades, *Kabar Wajo*, may 15 2015. <http://www.beritawajo.com/wajo-percontohan-perda-pilkades/5977/> 24/07/2016

⁵³ Edi Prekende, Wajo Sebagai Percontohan Perda Pilkades, *Kabar Wajo*, may 15 2015. <http://www.beritawajo.com/wajo-percontohan-perda-pilkades/5977/> 24/07/2016

B. Efektivitas Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Keera Tahun 2015.

Efektivitas adalah tercapainya sasaran sesuai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun tujuan diselenggarakannya pemilihan langsung menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Memilih wakil rakyat dan wakil daerah.
- b. Membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat.
- c. Keduanya dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Adapun tujuan dari pada penyelenggaraan pemilihan umum (*general election*) menurut **Jimmy Asshiddiqie** dapat dirumuskan dalam empat bagian yakni:⁵⁵

1. Untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.

⁵⁴ Nadia Erizanti, "Efisiensi dan Efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah," Skripsi, Universitas Bengkulu, 2004

⁵⁵ I Putu Yudistira, "Implementasi Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung dan Serentak menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015" Skripsi, Program Hukum Kebijakan dan Politik. 2016

Pemilihan Kepala Desa merupakan pemilihan yang paling sensitif dibandingkan dengan pemilihan yang lain karena dalam pemilihan Kepala Desa calon Kepala Desa dan pendukung berasal dari daerah yang sama dan bersinggungan secara langsung sehingga sangat rawan terjadinya konflik. Selain itu didalam pemilihan Kepala Desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi dalam setiap putaran Pemilihan Umum di Indonesia. Para calon-calon kepala desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan pemilihan dan mendapatkan kekuasaan ditingkat desa. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan salah satu tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. Sehingga dalam memenangkan proses pemilihan kepala desa untuk mendapatkan kekuasaan ditingkat desa diperlukan strategi kampanye dan pengerahan masa dengan berbagai macam cara demi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat desa.⁵⁶

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi ditingkat lokal yang tidak lazim diperbincangkan oleh masyarakat momen dimana aktor-aktor politik saling menjatuhkan dan menyinggung satu sama lain serta bersaing dalam perebutan kursi kekuasaan, dan memicu terjadinya konflik antar satu sama lain. Permasalahan atau perselisihan yang terjadi didalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana ditegaskan dalam (QS Asy Surah ayat 10)

⁵⁶ Fatkan Masruri, *Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2) Pp. No. 72 Tahun 2005, Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

Terjemahnya⁵⁷:

Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah. (Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya lah aku bertawakkal dan kepada-Nya-lah aku kembali.

Ayat yang dijelaskan diatas menyinggung tentang persaingan atau Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan yang selalu diwarnai konflik ditengah-tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa telah diatur tata caranya oleh Pemerintah Daerah di masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten. Seperti dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo nomor 5 tahun 2007 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Serta BPD membentuk Panitia Pemilihan yang mengatur tahapan Pemilihan Kepala Desa atas rekomendasi dari PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang meliputi:⁵⁸

- a. tahap persiapan
- b. pendataan daftar pemilih
- c. penjaringan bakal calon
- d. penyeleksian calon kepala desa

⁵⁷ Al-quran, Asy Surah Ayat 10, 17/11/2016

⁵⁸ Draft Dokumen PMD Kabupaten Wajo

- e. tahapan pemungutan suara dan penetapan kepala desa terpilih.

1. Tahap Persiapan

Kecamatan Keera terdapat 9 desa dan 1 kelurahan dan pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Keera pada bulan april tahun 2015 akan diikuti oleh 6 desa diantaranya, desa Lalliseng, Inrello, Ciromanie, Labawang, Paojepe, dan Awota.⁵⁹

a. Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD

Pemilihan kepala desa dimulai dengan dibentuknya panitia pemilihan. Panitia pemilihan bersifat independent, Panitia pemilihan bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa yang bersaing dalam proses pemilihan kepala desa.

“Panitia pemilih pelaksana pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa (BPD). Panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk berjumlah 5-15 orang tergantung dari hasil musyawarah, menurut Bapak Arhan Arsyad selaku Sekretaris PMD” Panitia yang terdiri dari komponen-komponen masyarakat desa yakni⁶⁰:

- a. Pengurus perangkat desa.
- b. Tokoh Masyarakat.

Dalam menjalankan tugas melaksanakan proses pemilihan kepala desa panitia pemilihan terdapat beberapa struktur yang dibagi atas beberapa jabatan dan tugas yakni⁶¹:

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Hasanuddin. S.Sos selaku Sekretaris Camat Keera, 22/07/2016

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Sekretaris PMD Kabupaten Wajo Bapak Arhan Arsyad, 21/11/2016

⁶¹ Draf dokumen PMD Kabupaten Wajo.

Ketua Panitia.

Ketua panitia pemilihan bertugas sebagai penanggungjawab terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut. Ketua panitia pemilihan memantau dan turut terlibat dalam seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa mulai dari tahap pencalonan bakal calon kepala desa hingga proses penghitungan hasil pemungutan suara. Ketua panitia bertanggung jawab terhadap proses berlangsungnya pemilihan kepala desa. Ketua panitia menampung aspirasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa termasuk permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses pemilihan untuk dapat diselesaikan dengan musyawarah.

Sekretaris panitia pemilihan

Sekretaris panitia bertugas sebagai membantu tugas ketua panitia dalam melaksanakan pemilihan kepala desa. Sekretaris bertugas dalam mempersiapkan hal-hal administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses pemilihan kepala desa. Tugas sekretaris desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa seperti memeriksa berkas dan kelengkapan bakal calon kepala desa dan penentuan jumlah peserta pemilihan dalam pemilihan kepala desa. Sekretaris panitia berasal dari sekretaris desa dikarenakan perlunya kerjasama dengan perangkat desa yang memahami administrasi demi kelancaran proses administrasi pemilihan kepala desa seperti proses pendataan daftar pemilih. Data dari jumlah pemilih yang sudah ditetapkan kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk dilakukan proses pencetakan surat-surat dan daftar berita acara.

Anggota-Anggota Panitia Pemilihan.

Anggota-anggota panitia pemilihan adalah anggota yang membantu jalannya proses pemilihan kepala desa. Anggota panitia pemilihan ini bertugas menjalankan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa agar berjalan dengan baik. Tahapan-tahapan yang dilakukan panitia pemilihan termasuk dalam proses pendataan pemilih, penelitian bakal calon, persiapan tempat pemungutan suara.

Kewajiban panitia dalam menjalankan tugas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa memiliki kewajiban sebagai berikut⁶² :

- a. Memperlakukan calon secara adil dan setara.
- b. Melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.
- c. Menyampaikan laporan kepada kepala daerah melalui camat untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan penyampaian informasi kegiatan kepada masyarakat.
- d. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan kepala daerah melalui camat.

⁶² Perda Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2007 Tentang tata cara pencalonan, pelaksanaan dan perhitungan suara.

Adapun Panitia Pemilihan yang di bentuk oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kecamatan Keera antara lain:⁶³

Desa Inrello

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Drs. Baharuddin Cani | Ketua |
| 2. Besse Amira, S. Sos | Sekretaris |
| 3. Hasnidar, Spd | Bendahara |
| 4. Masjidin, Spd. Mpd | Anggota |
| 5. Muhammad Nasir | Anggota |

Desa Lalliseng

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. H. Ambo ala, S.Sos | Ketua |
| 2. Marwana, S.Sos | Sekretaris |
| 3. Heriani | Bendahara |
| 4. Risman | Anggota |
| 5. Andi Asriadi | Anggota |
| 6. Ambo ansar | Anggota |
| 7. Ambo Atta | Anggota |

Desa Ciromanie

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Sulfian Hadiaksyah S.H | Ketua |
| 2. Jusmayanti, S.Sos | Sekretaris |
| 3. Besse Rika | Bendahara |

⁶³ Draf dokumen Desa Kecamatan Keera

- | | |
|----------------|---------|
| 4. Andi Wawang | Anggota |
| 5. Adi | Anggota |

Desa Labawang

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. Ayusriadi Lattu | Ketua |
| 2. Nilawati, S.pd | Sekretaris |
| 3. Rismayana | Bendahara |
| 4. Mulianandar | Anggota |
| 5. Kamaluddin | Anggota |
| 6. Wahyuddin | Anggota |
| 7. Ardiansyah | Anggota |

Desa Awota

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Baso Batara | Ketua |
| 2. Sandi Hanafia, S.pd | Sekretaris |
| 3. Hasnawati S.pd | Bendahara |
| 4. Imam Ramdani | Anggota |
| 5. Renaldi Hidayat | Anggota |
| 6. Ambo Sau | Anggota |

2. Tahap Pencalonan

a. Penjaringan dan Seleksi Bakal Calon Kepala Desa.

Permohonan Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan yang ditetapkan. Hasil penjaringan setelah dilengkapi dengan berkas persyaratan kemudian dilakukan penyaringan. Proses penjaringan Balon Kepala Desa dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data persyaratan masing-masing calon dan syarat kelengkapan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah No 7 Tahun 2007 berupa ⁶⁴:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Tidak Pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah lanjutan Tingkat pertama atau sederajat.
- e. Berumur sekurang kurangnya 25 (dua puluh Lima) tahun dan setinggi-tingginya 52 (lima puluh dua) tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana.
- h. Mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat .
- i. Bersedia di calonkan menjadi kepala desa.
- j. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama dua Kali masa jabatan.

⁶⁴ Draf dokumen PMD Kabupaten Wajo

- k. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat
- l. tinggal tetap didesa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir.
- m. Sudah menikah

b. Penetapan daftar nama calon kepala desa

- 1. Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa
- 2. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- 3. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁵

Berdasarkan dari Penjaringan bakal calon adapun daftar nama-nama calon kepala desa yang berhak dipilih di Kecamatan Keera antara lain:⁶⁶

- | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Desa Inrello | 2. Desa Lalliseng | 3. Desa Ciromanie |
| a. H. Umar | a. Amil sandi | a. Samsyul Mahrif |
| b. H. Baharuddi | b. Rafiuddin | b. Burhanuddin. HN |
| c. Muh. Rusli | c. Ambo Unga | |

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa

⁶⁶ Draf dokumen PMD Kabupaten Wajo

4. Desa Labawang

- a. Musmuliadi
- b. Muh. Riswan
- c. Muh. Asrul
- d. Haeruddin

5. Desa Paojepe

- a. M. Basri
- b. Bahtiar
- c. Salahudin Syukur

6. Desa Awota

- a. Andi Amirullah. S. Sos
- b. Andi Darmawansyah.

c. Pendataan daftar pemilih di Kecamatan Keera 2015**1. Desa Inrello**

Jumlah Pemilih 2.643 orang

Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya 1.955 orang

Jumlah suara yang dinyatakan batal 4 orang.

2. Desa Lalliseng

Jumlah Pemilih 2.733 orang

Jumlah yang hadir yang menggunakan hak pilihnya 1.845 orang

Jumlah suara yang batal 12 orang

3. Desa Ciromanie

Jumlah Pemilih 956 orang

Jumlah yang hadir yang menggunakan hak pilihnya 750 orang

Jumlah suara yang batal 2 orang

4. Desa Labawang

Jumlah pemilih 731 orang

Jumlah yang hadir yang menggunakan hak pilihnya 551 orang

5. Desa Paojepe

Jumlah pemilih 1.973

Jumlah yang hadir yang menggunakan hak pilihnya 1.353 orang

Jumlah suara yang batal 7 orang

6. Desa Awota

Jumlah pemilih 2.781 orang

Jumlah yang hadir yang menggunakan hak pilihnya 2.051 orang

Jumlah suara yang batal 3 orang.

Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala desa atau disingkat dengan pilkades. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan sesudahnya dapat dipilih langsung kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa atau Perangkat desa pada umumnya adalah masyarakat setempat atau bertempat tinggal di desa itu. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 14 sampai dengan 15 dijelaskan tugas kepala desa, kewenangan, kewajiban, dan hak kepala desa. Tugas kepala desa antara lain menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kewenangan kepala desa antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kewajiban Kepala desa antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati dan laporan pertanggungjawaban kepada BPD⁶⁷

⁶⁷ Setyo puji widodo, *Efektivitas Pemilihan Kepala Desa Serentak ditinjau dari perspektif Otonomi Daerah*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.⁶⁸

1. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
2. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat: pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.
3. Kepala desa menjabat maksimal 2 tahun masa jabatan.
4. Untuk pencalonan dan pemilihan kepala desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD.
5. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan: Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.
6. Calon kepala desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
7. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Calon kepala desa yang dinyatakan

⁶⁸ Setyo puji widodo, *Efektivitas Pemilihan Kepala Desa Serentak ditinjau dari perspektif Otonomi Daerah*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak, panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan berita acara Pemilihan dan panitia pemilihan.

8. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
9. Bupati memberikan Keputusan Bupati paling lama 15 hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
10. Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 hari terhitung dari tanggal penerbitan keputusan Bupati.
11. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

“Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Keera terbilang sangat memprihatinkan pada Pemilihan Kepala desa serentak Tahun 2015 maupun tahun-tahun sebelumnya. Calon kandidat Kepala Desa bisa dikatakan masih minim pengetahuan tentang demokrasi itu sendiri, 1 minggu sebelum pemilihan berlangsung, pencarian hak suara oleh pihak calon dilakukan secara terang-terangan dalam bentuk pembagian sembako atau hal yang semacamnya di tengah-tengah masyarakat dan melanggar peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.” Menurut saudara Reza seorang Mahasiswa UIN jurusan Ilmu Hukum.⁶⁹

Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Keera jauh dari peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam sebuah demokrasi

⁶⁹ Wawancara dengan Reza (tokoh masyarakat) Desa Lalliseng, 21/07/2016

khususnya ditingkat lokal masyarakat selalu dikejutkan dengan adanya pelanggaran etika-etika politik seperti *money politik*, *black campaign*, serta pemalsuan berkas yang lain. Fenomena uang yang terjadi ditengah-tengah masyarakat merupakan hal yang tidak asing lagi, dan merupakan hal yang sudah biasa terjadi baik dalam pemilihan kepala desa maupun pemilihan lainnya.

Tuntutan penerapan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah secara langsung semakin hari semakin menguat sebagai reaksi dari proses Pemilihan Kepala Daerah di sejumlah daerah yang sarat dengan kasus-kasus *money politics*, intervensi pusat, dan distorsi aspirasi publik. Mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung diyakini sebagai solusi kearah penguatan demokrasi ditingkat lokal sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang berkuasa.⁷⁰

3. Tahap Pemungutan Suara.

Tahapan pemungutan suara dimulai dengan pengumuman pemilihan oleh panitia dibantu oleh kepala dusun dengan ditempel ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan melakukan penyebaran surat undangan pemilihan dilakukan dengan rumah ke rumah. Selama 3 (tiga) hari sebelum berlangsung pemungutan suara. Sebelum berlangsungnya proses pemungutan suara panitia harus telah mempersiapkan perlengkapan proses pemungutan suara seperti surat suara yang telah ditetapkan dan kotak suara. Penentuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan oleh panitia ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

⁷⁰ Dede Mariana & Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) hlm. 25

Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari pemungutan suara bertindak sebagai panitia dalam pemungutan suara yang mempersiapkan dan melaksanakan proses pemungutan suara. Panitia pemilihan bertindak Sebagai Panitia Pemungutan Suara.⁷¹

Masyarakat desa yang akan mengikuti proses pemungutan suara harus membawa undangan yang telah diberikan oleh panitia. Panitia akan memberikan surat suara yang berisikan tanda gambar calon peserta pemilihan. Pemberian suara dilaksanakan dengan mencoblos salah satu tanda gambar surat suara yang telah disediakan oleh panitia dan dimasukkan kedalam kotak suara Setelah melakukan proses pemungutan suara peserta diberi tanda tinta. Suara sah dalam pemilihan kepala desa dianggap sah apabila⁷² :

- a. Surat suara ditandatangani oleh panitia pemilih
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada satu tanda gambar.

Esensi demokrasi adalah partisipasi publik dalam menentukan pejabat-pejabat politik dan dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam pandangan Rosseau, demokrasi tanpa partisipasi langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri.⁷³

“Dalam Demokrasi lokal Pemilihan Kepala Desa khususnya tidak lepas yang namanya permainan uang atau disebut dengan *money politik*, karena uanglah sehingga terjadi pemalsuan kartu panggilan memilih, hal tersebut merupakan dalam bentuk pelanggaran etika politik. Masyarakat menilai

⁷¹ Draf dokumen PMD Kabupaten Wajo

⁷² Draf dokumen PMD Kabupaten Wajo

⁷³ Dede Mariana & Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*.....hlm.32

calon Kepala Desa bukan dipandang dari latar belakang keluarga atau calon itu sendiri melainkan apa yang diberikan oleh masyarakat sebelum pemilihan itu dilaksanakan atau seberapa banyak suara ia bisa beli”.⁷⁴ Berdasarkan dari fakta yang terjadi menurut Kepala Desa Awota.

The Liang Gie dalam bukunya Ensiklopedia Administrasi mengemukakan definisi bahwa: “efektivitas yaitu suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek/akibat yang dikehendaki”.⁷⁵

Menurut **Richard. M Steers** Efektivitas kerja adalah suatu keadaan dimana aktifitas jasmaniah dan rohaniyah yang dilakukan oleh manusia dapat mencapai hasil akibat sesuai yang dikehendaki sedangkan menurut Siagian mengemukakan efektifitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan atau kegiatan tepat pada waktunya seperti yang ditetapkan sebelumnya.⁷⁶

Pemilihan umum yang berkualitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi hasilnya. Pemilihan umum dapat dikatakan berkualitas dari sisi prosesnya, apabila pemilu itu berlangsung secara demokratis, aman, tertib, dan lancar, serta jujur dan adil. Sedangkan apabila dilihat dari sisi hasilnya, pemilu itu harus dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat.⁷⁷

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Umar Kepala Desa Inello Kecamatan Keera. 22/07/2016

⁷⁵ Nuryahman, yang berjudul “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa*” Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Esa Unggul Jakarta: 2014

⁷⁶ Huvat, *Efektivitas kerja fasilitator dalam pelaksanaan program pnpm di Kecamatan laham kabupaten Mahakam ulu*, Jurnal, Pemerintahan Integratif,. 20016/09/26 volume 3 Nomor 1 2015: 76-87.

⁷⁷ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009) hlm. 3

Berdasarkan dari fenomena yang terjadi mengenai masalah Pemilihan Kepala Desa bahwa pemerintah maupun panitia pengawas TPS yang kurang efektif dan membawa sebuah dampak negatif pada masyarakat, serta calon pemimpin desa yang menghalalkan berbagai cara yang dilakukan untuk mencapai sebuah kekuasaan ditingkat lokal dan melanggar UU No.72 Tahun 2005 tentang desa yang berbunyi Pemilihan Kepala Desa Langsung, umum, bebas, jujur dan adil, serta melanggar Perda Wajo mengenai UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Cara pemilihan dan pencalonan Kepala Desa.

Permasalahan yang lain yang telah dianggap sering terjadi dan kita dapat dalam pemilihan-pemilihan baik itu pemilihan kepala desa, caleg dan sebagainya yaitu pada saat pencoblosan adanya fenomena serangan fajar atau beredarnya pemalsuan kartu panggilan memilih.

“Menurut saudara Sahibuddin warga desa Lalliseng bahwa fenomena serangan fajar kadang dilakukan secara terang-terangan di tempat TPS, tempat dimana wilayah mereka untuk mencari hak suara.”⁷⁸

Perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa juga menjadi topik pembahasan dimasyarakat Kecamatan Keera, bahwa masyarakat dalam memilih seorang pemimpin desa, memiliki pandangan dan alasan yang berbeda-beda, berdasarkan dari fenomena yang terjadi, sebagian masyarakat memilih seorang kepala desa dipandang dari latar belakang keluarga, dipandang dari kapasitas

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Sahibuddin Warga Desa Lalliseng, 28/07/2016

dan kualitas dalam membangun dan mensejahterakan rakyat, memilih karena keluarga, memilih karena uang, dan memilih karena ikut-ikutan tetangga.

4. Rekapitulasi perhitunga suara dan penetapan calon terpilih.⁷⁹

Tabel 6 : Rekapitulasi Suara

No	Desa	Nama Calon	Perhitungan Suara
			TPS
1	Desa Inrello	a. H. Umar	1.199
		b. H. Baharuddin	471
		c. H. Baharuddin	281
2	Desa Laliseng	a. Amil sandi	517
		b. Rafiuddin	591
		c. Ambo Unga	725
3	Desa Ciromanie	a. Samsyul Mahrif	254
		b. Burhanuddin. HN	494
4	Desa Labawang	a. Musmuliadi	145
		b. Haeruddin	314
		c. Muh. Riswan	92
5	Desa Paojepe	a. M. Basri	884
		b. Bahtiar	310
		c. Salahudin Syukur	152
6	Desa Awota	a. Andi Amirullah. S. Sos	1.571
		b. Andi Darmawansyah.	1297

⁷⁹ Draft Dokumen Desa Kecamatan Keera.

Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Keera diikuti oleh 6 desa diantaranya, Inrello, Lalliseng, Ciromanie, Labawang, paojepe, dan Awota. Adapun daftar nama-nama Kepala Desa yang terpilih antara lain:⁸⁰

1. Desa Inrello : H. Umar
2. Desa Lalliseng : Ambo Unga
3. Desa Ciromanie : Burhanuddin. HN
4. Desa Labawang : Haeruddin
5. Desa Paojepe : M. Basri
6. Desa Awota : Andi Amirullah, S. Sos.

Memilih merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Surbakti menilai perilaku pemilih ialah keikutsertaan Warga Negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak lepas dari pengaruh eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungan, sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalisme berdasarkan pengetahuan dari pengalaman yang dimiliki.⁸¹

⁸⁰ Draft Dokumen PMD Kabupaten Wajo.

⁸¹Ulfan Gunawan, *“Dampak Penggunaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pileg di Bantul” Skripsi*, Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

5. Pelanggaran-Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo 2015.

Pengukuran efektivitas pemilihan kepala desa bukan hanya berfokus pada pencapaian kepala desa terpilih melainkan juga memperhatikan pada proses sampai adanya kepala desa terpilih. Permasalahan-permasalahan yang terdapat didalam Pemilihan Kepala Desa dirangkum berdasarkan daripada informasi-informasi yang didapat dari beberapa responden dan pengamatan dilapangan. Permasalahan yang terjadi yang telah dirampung untuk memperjelas Pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Keera Tahun 2015 terlaksana secara efektif atau tidak.

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang terdapat didalam Pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Keera Tahun 2015 antara lain:

a. Pendataan Pemilih.

Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Keera terdapat permasalahan dalam hal pendataan daftar pemilih. Dalam pemilihan tersebut masih terdapat masyarakat desa yang tidak terdaftar oleh panitia pemilih. Dalam perundang-undangan yang ada melalui Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2015 menyebutkan dalam tahapan penyusunan daftar pemilih dilakukan oleh panitia dengan dibantu oleh kepala dusun dengan dilakukan secara rumah ke rumah yang dilakukan ditiap dusun.

Aspek administrasi adalah permasalahan kartu identitas. Masih ada masyarakat tidak memiliki KTP. Jika masyarakat tidak memiliki KTP maka tidak akan terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena secara administratif KTP yang menjadi rujukan dalam mendaftarkan dan membuat DPT. Maka masyarakat baru bisa terdaftar sebagai pemilih minimal sudah tinggal 6 bulan di satu tempat. Golput yang diakibatkan oleh faktor administratif ini bisa diminimalisir jika para petugas pendata pemilih melakukan pendataan secara benar dan maksimal untuk mendatangi rumah-rumah pemilih.

Namun pendataan pemilih yang dilakukan oleh panitia pemilih tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat desa seperti menurut beberapa warga.

“Saya termasuk salah satu orang yang kecewa karena tidak diadakannya pendataan pemilih dari rumah ke rumah warga, sehingga beberapa masyarakat tidak punya kartu panggilan untuk memilih, sementara ada juga yang tidak ada di daerah ini malah mendapatkan kartu panggilan memilih” menurut Bapak Arifin selaku Ketua Kelompok Tani di Desa Inrelo.⁸²

Keterangan yang serupa yang disampaikan oleh Bapak Redo selaku team sukses dari salah satu calon di Desa Lalliseng.

“Pendataan pemilih yang kurang baik mengakibatkan proses pemilihan kepala desa juga tidak baik, pada saat pendataan tidak menutup kemungkinan ada beberapa rumah tertutup sehingga tidak diadakannya pendataan secara menyeluruh dan tidak diadakan pendataan ulang sehingga banyak masyarakat tidak memiliki kartu panggilan memilih”

⁸²Hasil wawancara dengan Bapak Arifin tokoh masyarakat di Desa Inrelo. 22/11/2016

Mengenai persoalan pendataan yang berjalan kurang baik dan melanggar Perda Wajo Nomor 5 Tahun 2015 tentang pendataan pemilih dari rumah ke rumah melalui kepala dusun atau perangkat desa.

“Pendataan pemilih yang mengalami beberapa masalah diakui oleh salah satu anggota Panitia Pemilihan di Desa Inrello bahwa pendataan pemilih yang kita lakukan sebelum pemilihan ada partisipasi dari mahasiswa organisa Kecamatan Keera karena kurangnya tenaga kerja, tidak menutup kemungkinan ada beberapa kepala rumah tangga yang tidak didata dan tidak diadakannya pendata ulang, data pelengkap yang kita gunakan berdasarkan dari data kartu keluarga dan data dari perangkat desa, dan solusi yang diberikan oleh panitia pemilih untuk masyarakat yang tidak memiliki kartu panggilan agar membawa KTP pada saat mau melakukan pencoblosan”⁸³

Namun panitia menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak terdaftar dalam calon pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa akibat dari tidak adanya kepedulian dari masyarakat desa untuk melakukan pemeriksaan dan pelaporan kepada panitia dan balai desa dalam masa pengklarifikasian untuk dapat memperbaiki daftar pemilih sementara sebelum disahkan menjadi daftar pemilih tetap. Panitia pemilihan dalam penerapannya tidak bertindak secara maksimal sesuai dalam jangka waktu tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dalam hal pendataan pemilih yang hanya dilakukan selama 15 hari dari ketentuan yang ada selama 30 (tiga puluh) hari.

b. Pemungutan Suara.

⁸³ Hasil wawancara dengan saudara Muhammad Nasir, SE selaku Perangkat Desa dan juga merupakan Anggota Panitia Pemilihan di Desa Inrello. 22/11/2016

Agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan dengan baik dan tidak diwarnai dengan tindakan yang dapat mengganggu atau menggagalkan pelaksanaan Pilkades itu sendiri, maka larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Perda Wajo Nomor 5 Tahun 2015 telah ditekankan oleh panitia untuk dapat dihormati dengan sebaik mungkin agar tidak sampai dilanggar. Dalam hal ini, bakal calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa dilarang memberikan dan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung dengan nama apapun kepada siapapun dalam usaha untuk memenagkan dirinya dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Larangan tersebut dalam pelaksanaannya dilapangan ternyata dilanggar. Meski pada awalnya masyarakat maupun Calon Kepala Desa menyatakan tidak ada money politics (politik uang) dalam Pilkades di desa, namun patut di duga Calon Kepala Desa telah bersepakat untuk memberikan sesuatu kepada pemilik hak pilih. Dugaan tersebut setidaknya dapat diindikasikan dengan adanya Calon Kepala Desa yang memberi sejumlah uang kepada pemilik hak pilih. Maksud dari pemberian tersebut tidaklain dan tidak bukan agar para pemilik hak pilih mencoblos gambar/foto yang menjadi tanda dari Calon Kepala Desa yang memberi sesuatu tadi.

Berdasarkan dari kesepakatan BPD sekecamatan keera bahwa untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak pada tahun ini akan menjalankan mekanisme pemilihan yang tidak menggunakan pembagian sembako, amplop, atau

dalam bentuk pelanggaran yang sesuai dengan Perda Wajo Nomor 5 Tahun 2015 tentang mekanisme pemilihan.

Disatu sisi dalam pemilihan kepala desa money politik juga menjadi tren yang mengakibatkan rusaknya pola pemikiran masyarakat, akibatnya tidak lagi memilih calon yang memiliki kemampuan dan integritas dalam memimpin desa

“Bukan politik ketika tidak ada fenomena uang dalam sebuah demokrasi apalagi pemilihan kepala desa yang lebih kental dibandingkan pemilihan-pemilihan yang lain, uang merupakan segalanya didalam pemilihan yang mampu mempengaruhi sebuah pilihan”⁸⁴ menurut Masjidin S.pd, Mpd (Tokoh Masyarakat Ciromanie)

Inilah suatu pelanggaran yang nampaknya telah “dilegalisasi” melalui kesepakatan para Calon Kepala Desa. Suatu proses demokrasi di desa yang ternoda dan terabaikan lantaran dimungkinkan ada konspirasi di antara Calon Kepala Desa yang diketahui pihak panitia. Pelaksanaan Pilkades yang patut diduga berwarna *money politics* semacam itu sangat mungkin terjadi karena Pilkades sebagai pelaksanaan demokrasi di desa dilaksanakan dengan cara pemungutan suara. Konsekuensinya, pemungutan suara dalam Pilkades dilaksanakan sesuai dengan aturan Undang-undang yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil tentu patut dipertanyakan apabila di dalamnya patut diduga telah terjadi praktek *money politic*.

“Dalam Demokrasi lokal Pemilihan Kepala Desa khususnya tidak lepas yang namanya permainan uang atau disebut dengan *money politik*, karena uanglah sehingga terjadi pemalsuan kartu panggilan memilih, hal tersebut merupakan dalam bentuk pelanggaran etika politik. Masyarakat menilai calon Kepala Desa bukan dipandang dari latar belakang keluarga atau calon itu sendiri melainkan apa yang diberikan oleh masyarakat sebelum

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Saudara Masjidin S.pd, Mpd salah satu tokoh masyarakat ciromanie

pemilihan itu dilaksanakan atau seberapa banyak suara ia bisa beli”.⁸⁵ Berdasarkan dari fakta yang terjadi menurut Kepala Desa Awota.

Permasalahan yang sama yang disampaikan oleh saudara Arifuddin S⁸⁶ (toko pemuda) di Desa Labawang.

“Ketika calon Kepala Desa tidak memberikan sesuatu kepada masyarakat maka saya yakin calon tersebut mustahil akan terpilih, makanya 1 minggu sebelum pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara di TPS maka team sukses dari calon kandidat akan mencari suara yang bisa dibeli atau disebut serangan fajar”

Adanya *money politic* memang sulit dibuktikan tetapi dari beberapa indikasi dan pernyataan dari beberapa warga memang telah terjadi politik uang. Hal tersebut sulit untuk dibuktikan dan berakibat pada tidak adanya hukuman yang tegas bagi para Calon Kepala Desa yang melaksanakan politik uang tersebut.

Permasalahan yang lain yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Keera Tahun 2015, terkhusus Desa Awota yang terbilang daerah terpencil di Kecamatan Keera, adanya pembatasan wilayah untuk para calon kepala desa untuk mencari hak suara dalam memenangkan pemilihan. Pembatasan wilayah tersebut tidak ada sangkut paut dengan panitia pemilihan melainkan kesepakatan antar calon kandidat secara lisan bukan hitam diatas putih.

Saudara Azis mengatakan “pemilihan kepala desa selalu diwarnai dengan adanya kecurangan atau konflik, konflik itu terjadi sebelum pemungutan suara berlangsung. Didalam desa Awota calon kandidat memiliki batas wilayah untuk mencari hak suara, pada pemilihan kepala desa sebelumnya itulah yang menjadi konflik disebabkan adanya pelanggaran batas wilayah untuk mencari hak suara yang secara diam-diam dari pihak salah satu calon

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Umar Kepala Desa Inrello Kecamatan Keera. 22/07/2016

⁸⁶ Arifuddin S (toko pemuda) di Desa Labawang. 24/07/2016

sosialisasi di daerah lawan calonnya.” Hal tersebut sudah membudaya di Desa Awota.

Berdasarkan dari pengamatan mengenai pemilihan kepala desa, hal yang sering kita jumpai di lapangan pada saat pemungutan suara biasanya jumlah pemilih yang telah didata oleh pihak kepanitiaan pemilihan kepala desa tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir pada TPS.

“Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Arhan Rasyid⁸⁷ selaku Sekretaris PMD Kabupaten Wajo bahwasanya selama demokrasi ditingkat lokal terkhusus Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wajo tidak pernah sesuai dengan jumlah pemilih yang didata dengan jumlah pemilih yang hadir di TPS. Beberapa hal yang menjadi persoalan mengenai hal tersebut antara lain; kurang efektifnya pendataan pemilih di setiap desa sebelum pemilihan sehingga masyarakat yang tidak memiliki kartu panggilan pemilih tidak datang di tempat TPS, kemudian persoalan yang lain yaitu adanya sifat apatis yang dimiliki oleh masyarakat”

Mengenai persoalan tersebut hal serupa yang disampaikan oleh beberapa responden antara lain:

“Ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang didata dengan jumlah pemilih yang hadir di TPS merupakan hal yang wajar, selain daripada persoalan pendataan hal yang lain menjadi faktor-faktor penyebabnya yaitu perilaku pemilih itu sendiri, pada saat pendataan masyarakat didata di kediamannya dan pada saat pemilihan tidak menutup kemungkinan ada yang tidak berada di wilayah pemilihan dilaksanakan, adanya urusan lain, kemudian persoalan yang lain yaitu bertepatan dengan hari sibuknya masyarakat Kecamatan Keera karena pada waktu itu masyarakat sudah melakukan pembajakan sawah, dan juga sifat apatis yang dimiliki masyarakat juga mempengaruhi hal tersebut”.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga panitia pemilihan mengenai demokrasi yang baik dan pemilih yang cerdas sebelum diadakannya pemilihan kepala desa mengakibatkan banyak masyarakat yang

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Arhan Rasyid selaku Sekretaris PMD Kabupaten Wajo. 21/11/2016

bersifat apatis terhadap pemilihan. Hal yang diungkapkan oleh beberapa responden.

“saya tidak hadir di TPS pada saat pemilihan dikarenakan saya sibuk pergi kesawah, hal itu lebih penting bagi saya persoalan selalu diadakan pemilihan kepala desa yang menduduki kekuasaan tertinggi didesa dikarenakan pembangunan desa yang tidak efektif dan pelayanan desa tidak efektif pula”⁸⁸ menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Awota Bapak Ambo Unga.

“saya tidak hadir di TPS untuk memberikan hak suara saya persoalan saya tidak diberikan sesuatu oleh calon kepala desa sementara tetangga menerima amplop” menurut saudara Musbar (pemuda) masyarakat Desa Inrello.

c. Panitia Pemilihan dan Pengawas TPS.

Berdasarkan dari pengamatan peneliti mengenai Pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Keera Tahun 2015 menemukan beberapa fenomena yang tidak nyaman dipandang mata yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab seorang panitia pemilihan dan pengawas TPS yang kurang optimal dalam tugasnya. Didalam mekanisme pemilihan tentu sudah diatur dalam Undang-Undang mengenai jalur output dan input seorang pemilih, yang menandakan peraturan dan fakta yang terjadi dilapangan sangat berbeda.

“Jalur keluar masuknya seorang pemilih didalam pemilihan kepala desa tidak terlalu difungsikan, masih banyak ditemukan dilapangan atau di TPS orang-orang yang memiliki kenalan dibagian TPS tersebut bebas masuk melalui jalur keluarnya seorang pemilih bahkan adapun yang masuk mencoblos 2x dengan membawa kartu panggilan pemilih seseorang yang

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ambo Unga tokoh masyarakat Desa Awota.22/11/2016

tidak sempat hadir di tempat TPS dengan alasan sebagai perwakilan”⁸⁹ menurut Bapak Sirajuddin S.pd masyarakat Desa Ciromanie.

Berdasarkan dari responden tersebut menandakan bahwa panitia pemilihan lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Mengenai hal ini masyarakat tidak bisa disalahkan atas kondisi yang terjadi, karena memang tidak diajarkan dengan pendidikan politik yang baik dan menjadi pemilih cerdas.

Pemilihan Kepala Desa selanjutnya agar Pemerintah lebih efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum yang langsung dan bebas sesuai dengan UU dan Perda Wajo mengenai UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Cara pemilihan dan pencalonan Kepala Desa serta calon Kepala Desa agar menjadi pemimpin yang sesuai dengan QS. Al-Anbiya (21):73) yang berbunyi :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Terjemahnya:

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.⁹⁰ (QS. Al-Anbiya (21):73), dan Hadist yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sirajuddin S.pd salah satu Masyarakat Desa Ciromanie. 23/11/2016

⁹⁰ ragilmuhammad.2014/06/ayat-ayat-al-quran-dan-hadis-tentang-pemimpin.html 21/07/2016.

إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْعَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ.

Terjemahnya:

Dari Abu Sa'id berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zhalim. (Hadis hasan, diriwayatkan oleh al-Tirmizi, hadis no. 1250; dan Ahmad, hadis no. 10745 dan 1109).⁹¹

Berdasarkan dari permasalahan diatas, ayat dan hadits tersebut menegaskan bahwa pemimpin-pemimpin yang dilahirkan dari proses pesta demokrasi yang telah dilaksanakan agar menjadi pemimpin yang adil, bertanggung jawab, pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat, serta pemimpin yang sesuai dengan syariat-syariat islam. Seperti halnya seorang Kepala Desa bertanggung jawab terhadap kemaslahatan rakyatnya, seorang suami (lelaki) kepala rumah tangga adalah sebagai pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab terhadap mereka, seorang istri (wanita) adalah sebagai pemimpin dirumah, suaminya serta anaknya yang ia bertanggung jawab terhadap mereka. Dan seorang hamba (budak) adalah sebagai pemimpin dalam menjaga harta tuannya. Ketahuilah, kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian bertanggung jawab terhadap pimpinannya.

⁹¹ Pusat kajian hadis.com/hadis-hadis-tentang-pemilu-memilih-pemimpin. 21/07/2016



A. Kesimpulan

Demokrasi lokal dan khususnya Pemilihan Kepala Desa serentak yang dilaksanakan pada bulan April 2015 secara pelaksanaan berjalan dengan baik namun dalam proses Pemilihan Pelanggaran etika politik bukan lagi hal yang baru terjadi melainkan setiap Pemilihan Kepala Desa.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di beberapa daerah terjadi beberapa konflik yang dapat mengganggu proses pembangunan politik ditingkat desa. Seperti dalam konflik pemilihan kepala desa yang terjadi di Kecamatan Keera

Kabupaten Wajo. Dengan terjadinya konflik yang dalam beberapa pemilihan kepala desa maka akan menciptakan ketidak stabilan dalam pembangunan politik ditingkat desa dalam sistem pemilihan pemimpin. Maka peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2004 tentang proses pemilihan kepala desa untuk menciptakan otonomi desa seolah-olah tidak memiliki kekuatan. Konflik tersebut dalam pemilihan kepala desa dapat terjadi dalam tahapan proses pemilihan kepala desa yang dianggap oleh masyarakat desa terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses tersebut. Tahapan-tahapan pemilihan kepala desa yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat desa dapat terjadi berupa penyimpangandalam proses pencalonan kepala desa, pengerahan massa pendukung calon kepala desa, hingga dalam proses pemungutan suara. Dengan adanya konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa akan dapat merusak nilai-nilai demokrasi yang telah ada di tingkat desa semenjak dahulu dan akan dapat mengganggu nilai- nilai pembangunan politik di tingkat desa.

Pemilihan Kepala Desa serentak diKecamatan Keera sebagian Desa tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri tidak sesuai dengan UU No.72 Tahun 2005 tentang desa yang berbunyi Pemilihan Kepala Desa Langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Masih banyak permainan money politik yang terang-terangan, selebaran kertas gelap dan panitia pengawas Pemilihan pun juga tidak terlalu mempedulikan jalur keluar masuknya calon pemilih, masih banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi saya selaku Warga Masyarakat inello kecamatan keera, merasa sangat memperhatikan bahwa masyarakat selalu memandang Pemilihan Kepala Desa sama saja dari tahun ke tahun, masyarakat tidak memandang visi misi atau kinerja Kepala Desa yang terpilih, karna tanggapan masyarakat bahwa siapapun Kepala Desa yang terpilih pembangunan Desa diKecamatan Keera hampir dikatakan tidak ada perubahan.

B. Saran / Implikasi

Berbicara mengenai Demokrasi pelanggaran UU No.72 Tahun 2005 tentang desa yang berbunyi Pemilihan Kepala Desa Langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Atau pelanggaran etika politik baik dalam bentuk permainan money politik dan sebagainya itu sudah tidak asing lagi. Saya selaku masyarakat Kecamatan Keera Kabupaten Wajo sangat berharap kepada Pemerintah agar lebih memperhatikan hal-hal yang melanggar Perda Wajo mengenai UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Cara pemilihan dan pencalonan Kepala Desa untuk kedepannya. Dan serta pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan.

Harapan untuk kedepannya bagi masyarakat Kecamatan Keera agar merubah pandangan mereka dalam memilih calon Pemimpin yang benar-benar mampu untuk membangun dan memimpin Masyarakat, buka dipandang dan dipilih dari segi kekayaan karna secara tidak langsung suara masyarakat dibeli dengan murah demi mendapatkan kedudukan kekuasaan. Uang yang senilai 150 ribu tidak sebanding dengan apa yang akan didapatkan 5 Tahun masa Kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Abdullah, Rozali *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010

Abdul Rozak & Ubaedillah. *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008

Ansori, Saiful *"Model Pemilu Legislatif dan Eksekutif secara Serentak"* Skripsi, Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014

Bungin, Burhan *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Media Group, 2007

Carolina Paskarina & Dede mariana. *Demokrasi & Politik Desentralisasi*, Bandung: Graha Ilmu, 2009

Dwi Susilo, Rachmad K. *Kebijakan Elitisi Politik Indonesia*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2006

Draf dokumen Kecamatan Keera 2015

Data Statistik Kabupaten Wajo 2015

Draf dokumen PMD Kabupaten Wajo.

Departemen Agama RI (*QS Asy Syura dan terjemah, ayat: 38*)

Departemen Agama RI (*QS Asy Surah dan Terjemahnya, ayat: 10*)

Erisanti, Nadia *"Efisiensi dan Efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah"* Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014.

Gunawan, Ulfan *"Dampak Penggunaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pileg di Bantul"* Skripsi, Jurusan

Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2016

Hadis hasan, diriwayatkan oleh al-Tirmizi, hadis no. 1250; dan Ahmad, hadis no. 10745 dan 1109.

Hamdan Jurhanis & Irfan Idris. *Imlu Politik*, Makassar: Alauddin Press, 20109.

Handayani, Risma. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, Makassar: Alauddin University Press, 2014.

<http://www.antarasulsel.com/berita/68017/lbh-makassar-kecam-penyelenggara-pilkades-wajo>

Ilhamsyah, Fadil “*Efektivitas Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung dalam Mewujudkan Demokrasi di Aceh*” *Skripsi*, Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Aceh 2014.

Kurniawan, Hery. “*Politik Lokal Di Tingkat Desa*” (*Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa*), *Skripsi*, Jurusan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara Medan, 2009

Kuntowijoyo, *Demokrasi dan Budaya Birokrasi*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994

Lesmana, Muhammad Indra. “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait penyelenggaraan pemilihan umum serentak ditinjau dari perspektif demokrasi*” *Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2015

Masruri, Fatkan *Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2) Pp. No. 72 Tahun 2005*, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

Masri, Rasyid *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan pedesaan*, Makassar: Alauddin University Press, 2014

Mahsuri, Fatkhan “*Pengaruh Money Politik dalam Pilkades*” *Terkait Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspsanteren*, *Skripsi*, Program Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kalijaga Yogyakarta

M Papasi, *Ilmu Politik Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Moesafa, Joko J. Prihatmoko *Menang Pemilu di Tengah Oligarki*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Meleong, Lexy J *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1989.

Nasiwan & Cholisin. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012

Perda Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2007 Tentang tata cara pencalonan, pelaksanaan dan perhitungan suara.

Prekende, Edi Wajo Sebagai Percontohan Perda Pilkades, *Kabar Wajo*, may 15 2015. <http://www.beritawajo.com/wajo-percontohan-perda-pilkades>

Sutina, Bagong Suyanto *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2005

UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang Peraturan Daerah.

UU pasal 72 Tahun 2005 tentang desa, UU nomor 52 tentang masa jabatan Kepala Desa (enam) 6 tahun dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa

widodo, Setyo puji *Efektivitas Pemilihan Kepala Desa Serentak ditinjau dari perspektif Otonomi Daerah*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang

Yudistira, I Putu “*Implementasi Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung dan Serentak menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015*” Skripsi, Program Hukum Kebijakan dan Politik. Universitas Pasundan, 2016

Zamroni, *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.



1 2 0 1 6 1 9 1 4 2 1 0 1 3 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 9846/S.01.P/P2T/07/2016

Lampiran :

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bupati Wajo

di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar Nomor : UF/PP.00.9/53/2016 tanggal 19 Juli 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUHAMMAD YUNUS**
Nomor Pokok : 30600112134
Program Studi : Ilmu Politik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" EFEKTIVITAS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2015 (AMALISIS TERHADAP PILKADES SERENTAK DI KECAMATAN KEERA KAB WAJO) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **25 Juli s/d 25 Agustus 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 22 Juli 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar;
2. Peninggal





SRN CO 0000430

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Jend. Achmad Yani No. 33 Tlp/Fax (0485) 323549

www.bpptpmwajokab@gmail.com, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

IZIN PENELITIAN / SURVEY**Nomor : 0375/IP/BPPTPM/2016**

- Membaca** : Surat Permohonan **MUHAMMAD YUNUS** Tanggal **22-08-2016**
Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo
- Memperhatikan** : 1. Surat Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat UIN Alauddin Makassar Nomor : UF/PP.00.9/53/2016 Tanggal 19 Juli 2016 Perihal : Izin Penelitian.
2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **00372/IP/TIM-TEKNIS/IX/2016** Tanggal **22-08-2016** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey
- Menetapkan** : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY kepada :
- Nama : **MUHAMMAD YUNUS**
Tempat / Tgl Lahir : **LONGKA , 21 MARET 1993**
Alamat : **BTN ANDI TONRO PERMAI BLOK D5A/6**
Universitas / lembaga : **UIN ALAUDDIN MAKASSAR**
Judul Penelitian : **EFEKTIFITAS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2015 (ANALISIS TERHADAP PILKADES SERENTAK DI KECAMATAN KEERA KABUPATEN WAJO)**
- Lokasi Penelitian : 1. **KPU**
2. **KANTOR BUPATI**
3. **KECAMATAN KEERA**
- Lama Penelitian : **25 Juli 2016 s.d 25 September 2016**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah
3. Mentaati Semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat



Ditetapkan di : **Sengkang**
Pada Tanggal : **22 Agustus 2016**

KEPALA BADAN,**SYAMSU ALAM, S.Sos****Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Wajo
2. Kepala Instansi Tempat Penelitian
3. Camat Setempat
4. Peringgal

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA**NIP : 19570904 198501 1 001****Retribusi : Rp. 0**